

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
April 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan merupakan dasar dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR). Pengendalian atas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat.

Demikian Rencana Tindak Lanjut (RTP) Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, terima kasih.

Painan, 3 April 2023

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780519 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Sekilas SPIP.....	4
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	5
2.1 Lingkungan Pengendalian.....	5
2.2 Kegiatan Pengendalian.....	5
2.3 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian Yang Baik.....	6
2.4 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini.....	6
2.5 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	8
2.6 Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>).....	9
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN.....	10
3.1 Penilaian Resiko.....	10
3.2 Risiko-Risiko.....	10
3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	11
3.4 Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	11
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	13
4.1 Informasi dan Komunikasi.....	13
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN.....	14
BAB VI PENUTUP.....	16
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah **“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”**. Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien

diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2023.

1.5 Sekilas tentang SPIP

1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1.5.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

2.1 Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.2 Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

2.3 Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian Yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- e. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- f. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2.4 Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pertanian

Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (6 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai

6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

2.5 Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	-	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	-	-	-	-	-
III	Kepemimpinan yang kondusif				
1	-	-	-	-	-
IV	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan				
1	-	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
1	-	-	-	-	-
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Insentif pegawai masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	DINAS PERTANIAN DAN BKPSDM	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2024
2	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Alokasi dana untuk Operasional dan belanja rutin	DINAS PERTANIAN DAN BKPSDM	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2024
VII	Perwujudan peran APIP yang efektif				
1	-	-	-	-	-
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
1	-	-	-	-	-

2.6 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani.

3.1 Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Risiko - Risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tersebut adalah :

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.23.27.26.	16	Kepala Daerah	Rendahnya produksi pertanian	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
II Risiko Strategis OPD 1						
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSO.23.27.26.	12	Kepala Dinas	Rendahnya produksi pertanian	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
III Risiko Operasional OPD 1: Dinas Pertanian						
1	Laporan jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	ROO.23.27.26.01	12	Kepala Bidang	ada 15 laporan yang menjadi target pada tahun 2023, sehingga harus ada sinergi dengan penyuluh lapangan dalam pelaporan	Data belum bisa disajikan
2	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dilapangan	ROO.23.27.26.02	12	Kepala Bidang	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah alsintan dan kelompok tani yang menerima bantuan)	Belum maksimalnya pemantauan dan evaluasi bantuan yang disalurkan
3	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana pertanian	ROO.23.27.26.03	16	Kepala Bidang	kurangnya koordinasi penyuluh dan kelompok tani	Kurangnya sosialisasi dengan calon penerima bantuan
4	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian per petani per wilayah	ROO.23.27.26.04	16	Kepala Bidang	masih adanya bantuan yg belum sepenuhnya dimanfaatkan	Rendahnya kepuasan masyarakat

3.3 Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud.

3.4 Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Pengendalian yang masih dibutuhkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.23.27.26.01.	Upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian	Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Kepala Daerah	Triwulan I 2024
II Risiko Strategis Dinas Pertanian							
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSO.23.27.26.01.	Upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian	Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Kepala Dinas	Triwulan I 2024
III Risiko Operasional Dinas Pertanian							
1	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana	ROO.23.27.26.03.	data penerima bantuan per tahun	data petani lengkap dengan titik koordinat	Pendampingan intensif kelompok penerima	Kepala Bidang	Triwulan I 2024
2	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian per petani per wilayah	ROO.23.27.26.04.	pendampingan kelompok penerima bantuan per tahun	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Kepala Bidang	Triwulan I 2024

Selain itu, kegiatan pengendalian juga harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1.1 Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

Rancangan Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah :

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Rapat	Sekda/Bappedalitbang/BPKPAD	Dinas Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	
2	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Rapat	Dinas Pertanian	Kantor Balai Penyuluhan Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	
3	Pendampingan intensif kelompok penerima bantuan	Rapat	Dinas Pertanian	Staff/ Penyuluh Dinas Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	
4	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Rapat/Surat tugas pendampingan intensif Kepada penyuluh lapangan	Kepala Bidang	Staff/ Penyuluh Dinas Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Rancangan pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

➤ Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Bidang pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing.

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan rapat	Kepala Dinas Pertanian	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	
2	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
3	Pendampingan intensif kelompok penerima bantuan	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Staf/Penyuluh	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
4	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Staf/Penyuluh	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I Risiko Strategis Pemda										
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.23.27.26	Desember 2022	Rendahnya produksi pertanian	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Tidak Terjadi	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti
II Risiko Strategis Dinas Pertanian										
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSO.23.27.26	Desember 2022	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti
III Risiko Operasional Dinas Pertanian										
1	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana pertanian	ROO.23.27.26.01	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Pendampingan intensif kelompok penerima bantuan	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti
2	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian per petani per wilayah	ROO.23.27.26.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti

BAB VI

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Painan, April 2023

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780519 200501 1 009

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Penilaian : 2023

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
a	b	c						d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	4	4	3	4	4	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	4	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	4	4	4	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	4	4	4	4	4	Memadai
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	4	4	4	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	4	4	4	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	3	3	4	Memadai
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	4	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	4	4	4	4	4	4	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	4	4	4	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	4	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	4	4	4	4	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	4	4	4	4	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan	4	4	4	4	4	4	Memadai
D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	4	4	4	4	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	4	3	3	3	4	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	Memadai
E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	Memadai

[illegible]

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nama OPD		: DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	
Tahun Penilaian		: 2023	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	LHP Nomor: 700/570/Insp-PS/III/2022	Pemeriksaan Khusus Persediaan Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Pemeriksaan khusus Persediaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama OPD : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan		Tahun Penilaian : 2023					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika dalam lingkungan Dinas sudah memadai, ini dilihat dari kedisiplinan kerja dan hasil kinerja serta tidak ada nya pegawai yang tersangkut kasus	Memadai	Penegakan dan nilai etika dalam lingkup Dinas sudah memadai	Memadai	Penegakan integritas dan nilai etika dalam lingkungan Dinas sudah memadai, ini dilihat dari kedisiplinan kinerja dan tidak ada nya pegawai yang tersangkut kasus hukum
		Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku yang sudah dikomunikasikan dengan seluruh pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
		Memadai	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Memadai	Sudah terdapat fungsi khusus pada dinas yang melayani pengaduan masyarakat	Memadai	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik
		Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Memadai	Setiap pelaku pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindak lanjuti sesuai	Memadai	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	Memadai	Komitmen terhadap kompetensi sudah memadai	Memadai	Pegawai sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki sehingga hasil evaluasi kinerja nya sesuai dengan analisis jabatan yang bersangkutan
		Memadai	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	Memadai	Jabatan yang ada sudah diisi oleh pegawai yang kompeten	Memadai	Pegawai yang kompeten dan berpengalaman telah secara tepat mengisi posisi/jabatan yang ada
		Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Memadai	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai dengan adanya ujian kompetensi
		Memadai	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Memadai	Telah diadakan nya pelatihan terkait pengelolaan risiko melalui terintegrasi	Memadai	Telah diadakan nya pelatihan terkait pengelolaan risiko terintegrasi melalui pelatihan terintegrasi secara berkala
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko pada masing-masing sub kegiatan
		Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	Memadai	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada kinerja dinas
		Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah yang ditemui di	Memadai	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah yang ditemui di lapangan
		Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja demi terwujudnya tujuan organisasi
		Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	Memadai	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda
		Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	Memadai	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)
		Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	Memadai	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko
		Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Memadai	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko
4	Pembentukan Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang	Memadai	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat
		Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
		Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)
		Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Memadai	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	Memadai	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat
		Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan secara tepat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat
		Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Memadai	Kewenangan direviu secara periodik

6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	Memadai	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)
		Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	Memadai	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik
		Kurang Memadai	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Kurang Memadai	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Kurang Memadai	Insentif pegawai masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
		Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Memadai	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko
		Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)
		Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam	Memadai	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
		Kurang Memadai	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Alokasi dana untuk Operasional dan belanja rutin
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik
		Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	Memadai	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya
		Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP
		Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	Memadai	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko
		Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	Memadai	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun
		Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
Visi	: Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional
Misi Strategis RPJMD	1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. 3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. 4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi Tujuan 2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tujuan 2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan Tujuan 4.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 5.1 Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas. Tujuan 5.2 Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan
Sasaran RPJMD	sasaran 1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja sasaran 1.1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi sasaran 1.1.3 Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik sasaran 2.1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat sasaran 2.1.2 Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat sasaran 2.2.1 Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat sasaran 2.2.2 Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin sasaran 3.1.1 Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. sasaran 3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan sasaran 3.1.3 Menurunnya Pengangguran sasaran 3.1.4 Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan sasaran 4.1.1 Pesisir Selatan Menjadi Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia sasaran 4.1.2 Berkembangnya Ekonomi Kreatif sasaran 5.1.1 Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan sasaran 5.2.1 Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat sasaran 5.2.2 Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing. sasaran 6.1.1 Terwujudnya Keluarga Bahagia. sasaran 6.1.2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	sasaran 3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
IKU Sasaran RPJMD	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian	
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	
Sumber Data	: Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	
Sasaran Strategis	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja 2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 3. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	
IKU Renstra OPD	IKU	2023
Indikator Kinerja Utama	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	65 (B)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	89,09 (A)
	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	100
	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,04 Triliyun
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani Sasaran Strategis: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan IKU Strategis: Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Program: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Kabupaten Pesisir Selatan, 3 April 2023 Kepala Dinas Pertanian  MADRIANTO, S.Hut., M.H. NIP. 19780519 200501 1 009

Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian	
Nama Dinas Terkait	Dinas Perikanan dan Pangan	
	Dinas Perkimtan LH	
	Dinas PUTR	
	Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan sasaran 3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan IKU Sasaran Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Kabupaten Pesisir Selatan, 3 April 2023 Kepala Dinas Pertanian  MADRIANTO, S.Hut., M.H. NIP. 19780519 200501 1 009

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan , Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian	
OPD yang Dinilai	: Dinas Pertanian	
Sumber Data	: Renja Dinas Pertanian Tahun 2023	
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	
Program Dinas Pertanian (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	15 laporan
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		Kabupaten Pesisir Selatan, 3 April 2023 Kepala Dinas Pertanian  MADRIANTO, S.Hut., M.H. NIP. 19780519 200501 1 009

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat									
Nama OPD		: Dinas Pertanian									
Tahun Penilaian		: 2023									
Periode yang dinilai		: Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)									
Urutan Pemerintahan		: Urutan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/U/C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Plhak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan Strategis Pemda 3.1: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.2 3.27.26	Kepala Daerah	Rendahnya produksi pertanian	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat	
a	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Jumlah Produksi Pertanian	Rendahnya Produksi Pertanian	RSP.2 3.27.26	Kepala Daerah	Tingginya biaya produksi pertanian	Internal	C	Terjadi alih fungsi lahan pertanian	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat	
		Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur Budidaya Pertanian)	Rendahnya SDM Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani	RSP.2 3.27.26	Kepala Daerah	Kurangnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari Petugas	Internal	C	Budidaya tanaman yang dilakukan Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani tidak sesuai dengan SOP	OPD Terkait Masyarakat	
		Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Rendahnya produktivitas pertanian	RSP.2 3.27.26	Kepala Daerah	Rendahnya penggunaan benih/bibit unggul dan bersertifikat	Internal	C	Turunnya produksi pertanian	Kepala Daerah OPD Terkait Masyarakat	

		Persentase Ternak Unggul	Rendahnya Kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)	RSP 2 3.27.26 Daerah 04.	Kepala	Terbatasnya SDM peternak dan petugas serta kurangnya sarana prasarana penunjang penerapan teknologi peternakan yang dimiliki peternak	Internal	C	Kurang maksimalnya keberhasilan Inseminasi Buatan, ini dilihat dari persentase ternak bunting dan anak hasil IB	OPD Terkait Masyarakat
--	--	--------------------------	---	-----------------------------	--------	---	----------	---	---	------------------------

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
 Nama OPD : Dinas Pertanian
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2021-2026)
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani									
a	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSO.23.27.26.	Kepala Dinas Pertanian	Rendahnya produksi pertanian	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	OPD Terkait Masyarakat
				RSO.23.27.26.01.	Kepala Dinas Pertanian	Tingginya biaya produksi pertanian	Internal	C	Terjadi alih fungsi lahan pertanian	OPD Terkait Masyarakat
				RSO.23.27.26.02.	Kepala Dinas Pertanian	Rendahnya SDM Petani/keompok tani/gabungan kelompok tani	Internal	C	Tidak dimantulkannya secara optimal bantuan sarana yang telah diberikan kepada petani/keompok tani/gabungan kelompok tani.	
				RSO.23.27.26.03.	Kepala Dinas Pertanian	Kurangnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari Petugas	Internal	C	Budidaya tanaman yang dilakukan Petani/keompok tani/gabungan kelompok tani tidak sesuai dengan SOP	OPD Terkait Masyarakat
	Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur Budidaya Pertanian)		Rendahnya SDM Petani/keompok tani/gabungan kelompok tani	RSO.23.27.26.04.	Kepala Dinas Pertanian	Rendahnya penggunaan benih unggul dan bersertifikat	Internal	C	Turunnya produksi pertanian	OPD Terkait Masyarakat
	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun		Rendahnya produktivitas pertanian	RSO.23.27.26.05.	Kepala Dinas Pertanian	Terbatasnya SDM peternak dan petugas serta kurangnya sarana prasarana penunjang penerapan teknologi peternakan yang dimiliki peternak	Internal	C	Kurang maksimalnya keberhasilan inseminasi Buatan, ini dilihat dari persentase ternak bunting dan anak hasil IB	OPD Terkait Masyarakat

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Penda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
 Nama OPD : Dinas Pertanian
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Produksi Pertanian
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab ^{*)}		Sumber	C/UC	Dampak ^(**)		Pihak yang Terkena
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian				Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian												
1	Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Penggunaan Sarana Pertanian												
a	Sub Kegiatan Pengembangan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengembangan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pelaporan	Laporan jumlah pengembangan penggunaan sarana pertanian	ROO.23.27.26.01.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kepala Bidang Perternakan	ada 15 laporan yang menjadi target pada tahun 2023, sehingga harus ada sinergi dengan penyuluh lapangan dalam pelaporan	Internal	UC	Data belum bisa disajikan	Dinas Pertanian Masyarakat		
		Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan di lapangan	ROO.23.27.26.02.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kepala Bidang Perternakan	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah asintan dan kelompok tani yang menerima bantuan)	Internal	C	Belum maksimalnya pemantauan dan evaluasi bantuan yang disalurkan	Dinas Pertanian Masyarakat			
	Perencanaan	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana pertanian	ROO.23.27.26.03.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan Kepala Bidang Perternakan	Kurangnya koordinasi penyuluh dan kelompok tani	Internal	C	Kurangnya sosialisasi dengan calon penerima bantuan	Dinas Pertanian Masyarakat				

[illegible]

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko $f=d \times e$
a	b	c	d	e	
I	Risiko Strategis				
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.23.27.26.01.	4	4	16
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Pertanian				
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSO.23.27.26.01.	4	3	12
III	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Pertanian				
1	Laporan jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	ROO.23.27.26.01.	4	3	12
2	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan di lapangan	ROO.23.27.26.02.	4	3	12
3	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana pertanian	ROO.23.27.26.03.	4	4	16
4	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian per petani per wilayah	ROO.23.27.26.04.	4	4	16

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.23.27.26.01.	Upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian	Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Kepala Daerah	Triwulan I 2024
II	Risiko Strategis Dinas						
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSO.23.27.26.01.	Upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian	Peningkatan penggunaan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Kepala Dinas	Triwulan I 2024
III	Risiko Operasional Dinas						
1	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana	ROO.23.2.7.26.03.	data penerima bantuan per tahun	data petani lengkap dengan titik koordinat	Pendampingan intensif kelompok penerima	Kepala Bidang	Triwulan I 2024
2	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian per petani per wilayah	ROO.23.2.7.26.04.	pendampingan kelompok penerima bantuan per tahun	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Kepala Bidang	Triwulan I 2024

Kertas Kerja

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.23.27.26.	16	Kepala Daerah	Rendahnya produksi pertanian	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
II	Risiko Strategis OPD 1					
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSO.23.27.26.	12	Kepala Dinas	Rendahnya produksi pertanian	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
III	Risiko Operasional OPD 1: Dinas Pertanian					
1	Laporan jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	ROO.23.27.26.01	12	Kepala Bidang	ada 15 laporan yang menjadi target pada tahun 2023, sehingga harus ada sinergi dengan penyuluh lapangan dalam pelaporan	Data belum bisa disajikan
2	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan dilapangan	ROO.23.27.26.02	12	Kepala Bidang	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah alsintan dan kelompok tani yang menerima bantuan)	Belum maksimalnya pemantauan dan evaluasi bantuan yang disalurkan
3	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana pertanian	ROO.23.27.26.03	16	Kepala Bidang	kurangnya koordinasi penyuluh dan kelompok tani	Kurangnya sosialisasi dengan calon penerima bantuan
4	pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian per petani per wilayah	ROO.23.27.26.04	16	Kepala Bidang	masih adanya bantuan yg belum sepenuhnya dimanfaatkan	Rendahnya kepuasan masyarakat

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian : 2023

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	-	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	-	-	-	-	-
III	Kepemimpinan yang kondusif				
1	-	-	-	-	-
IV	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan				
1	-	-	-	-	-
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
1	-	-	-	-	-
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Insentif pegawai belum sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	Insentif pegawai masih disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	DINAS PERTANIAN DAN BKPSDM	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2024
2	Instansi belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Alokasi dana untuk Operasional dan belanja rutin	DINAS PERTANIAN DAN BKPSDM	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2024
VII	Perwujudan peran APIP yang efektif				
1	-	-	-	-	-
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
1	-	-	-	-	-

CONTOH
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat : 2023 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani : Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Rapat	Sekda/Bappedalitbang/ BPPPAD	Dinas Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	
2	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Rapat	Dinas Pertanian	Kantor Balai Penyuluhan Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	
3	Pendampingan intensif kelompok penerima bantuan	Rapat	Dinas Pertanian	Staf/ Penyuluh Dinas Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	
4	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Rapat/Surat tugas pendampingan intensif kepada penyuluh lapangan	Kepala Bidang	Staf/ Penyuluh Dinas Pertanian	Triwulan I 2024	Triwulan I 2024	

CONTOH
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan rapat	Kepala Dinas Pertanian	Oktober, November, Desember 2023	Oktober, November, Desember 2023	
2	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Dinas Pertanian	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
3	Pendampingan intensif kelompok penerima bantuan	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Staf/Penyuluh	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	
4	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Staf/Penyuluh	Triwulan IV 2023	Triwulan IV 2023	

**CONTOH
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP**

Lampiran 5
Form 10

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan											: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat : 2023 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani : Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian			
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan				
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k				
I	Risiko Strategis Pemda													
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSP.19.01.01.01	Desember 2022	Rendahnya produksi pertanian	Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Tidak Terjadi	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti				
II	Risiko Strategis Dinas Pertanian													
1	Rendahnya nilai PDRB Sektor Pertanian	RSC.19.01.02.01	Desember 2022	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Peningkatan kualitas budidaya pertanian	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti				
III	Risiko Operasional Dinas Pertanian													
1	Jumlah Data petani yang menerima bantuan sarana pertanian	ROO.19.01.03.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Pendampingan intensif kelompok penerima bantuan	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti				
2	pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian per petani per wilayah	ROO.19.01.03.04	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang mendapat sarana pendukung pertanian per wilayah	Triwulan IV 2023	Triwulan I 2024	akan ditindaklanjuti				